

fof

# HAK ASASI MANUSIA DAN INDONESIA SEBAGAI KETUA GERAKAN NON-BLOK

Sarasehan dengan Juwono Sudarsono

*Dalam setiap nomor penerbitan AFKAR, kami menyajikan rubrik yang kami sebut "Sarasehan". Dalam rubrik ini disajikan suntingan rekaman sarasehan yang dilaksanakan dengan tema tertentu, dan diawali prasaran seorang ahli tertentu.*

*Untuk nomor ini, tema sarasehan yang dipilih adalah "Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan Indonesia sebagai Ketua Gerakan Non-Blok". Hadir dalam sarasehan yang dilaksanakan pada Senin, 16 Nopember 1992 lalu itu, sekitar 30 undangan dari berbagai kalangan. Yang memberi prasaran dalam sarasehan ini adalah Prof. Dr. Juwono Sudarsono dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Sarasehan ini diawali oleh pengantar moderator Dr. Dewi Fortuna Anwar dari Center for Information and Development Studies (CIDES). Berikut rekaman sarasehan tersebut, setelah disunting seperlunya (Redaksi).*

Masalah hak-hak asasi manusia (HAM) memang bukan masalah baru. Sejak dulu, mulai abad ke-17 dan ke-18, masalah ini telah menjadi masalah yang diprioritaskan orang-orang di Eropa. Tetapi nampaknya sekarang ini, apalagi di Indonesia, masalah ini makin mencuat dengan adanya pengkaitan antara masalah HAM dengan bantuan ekonomi terhadap negara kita dari negara-negara donor.

Selama ini negara-negara donor tidak terlalu

menekankan masalah-masalah HAM, lingkungan hidup, atau pun demokrasi, dalam pemberian bantuan-bantuannya kepada negara-negara berkembang. Tetapi dengan berakhirnya Perang Dingin, masalah-masalah yang sebenarnya telah lama ada ini mulai diangkat lagi ke permukaan. Jadi, inilah nampaknya yang membuat perdebatan semakin seru. Dan, kalau kita ingat pertemuan ASEAN di Manila bulan Juli lalu, di sana sampai terjadi suatu kebuntuan antara ASEAN dan ME (Masyarakat Eropa). ME ngotot untuk memasuk-

kan atau mengaitkan bantuan ekonomi dengan persoalan HAM, sedang ASEAN mengatakan tidak bisa menerima prinsip tersebut. Akhirnya terjadi kompromi untuk menunda pembaruan kerjasama ASEAN-ME.

Hari ini kita sangat berbahagia dapat mengundang Bapak Prof. Dr. Juwono Sudarsono untuk berbicara mengenai HAM dan peranan Indonesia sebagai ketua Gerakan Non-Blok (GNB). Termasuk mengenai apa yang sudah sama-sama kita ketahui, yakni statement politik yang sangat penting mengenai posisi negara-negara berkembang dalam menangani masalah HAM, yang dikeluarkan GNB dalam KTT-nya kemarin.

#### Juwono Sudarsono

Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa saya berbicara sebagai orang awam di bidang ini. Tiga puluh tahun yang lalu saya baru lulus ujian tentang hukum tata negara dari Pak Ismail Sunny di Salemba, tidak berapa lama setelah beliau mempertahankan disertasinya di UI. Dan, kalau berhadapan dengan Pak Princen, saya kira kita tahu semua bahwa beliau bukan hanya secara konsepsional memahami masalah HAM ini, tetapi juga secara pribadi mengalami dan secara empirik terlibat langsung dengan masalah-masalah ini di lapangan.

Judul yang diberikan kepada saya adalah "Hak Asasi Manusia dan Indonesia sebagai Ketua GNB". Dari judulnya sudah diketahui bahwa sorotan utama atas masalah hak asasi ini akan, terutama, diarahkan kepada bidang kajian saya, yaitu hubungan internasional. Karena itu, saya tidak akan berlama-lama mengemukakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep filosofis HAM, maupun yang berhubungan dengan perdebatan pelaksanaannya di beberapa negara. Walaupun demikian keduanya, tentu saja, boleh kita diskusikan.

Sebenarnya, apa makna kita ditugaskan untuk menjadi Ketua GNB di dalam era di mana, untuk pertama kalinya, KTT diselenggarakan dalam masa pasca Perang Dingin dan pasca Uni Soviet

(US)? Dan apa kaitannya dengan masalah HAM?

Saya kira, implikasi pertama adalah bahwa untuk pertama kalinya setelah bubarnya US, masalah HAM itu tidak lagi menjadi perantara dalam persaingan Timur-Barat, tetapi langsung menjadi masalah Utara-Selatan. Jadi, kalau tadinya pemerintah-pemerintah di negara Barat itu memakai hak asasi sebagai bagian dari usaha untuk mendapat sekutu dalam rangka Perang Dingin, maka hak asasi sekarang ini secara langsung menjadi bagian dari persoalan Utara-Selatan, yang sejak tahun 1974 sudah masuk dalam agenda PBB.

Makna yang kedua, saya kira — bagi kita — adalah, bahwa ada satu tanggung jawab khusus dari apa yang kita lakukan di dalam negeri sebagai usaha — bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari kita semua sebagai warga negara — bahwa kita pantas menjadi Ketua GNB. Salah satu dasar kepantasan itu bukan hanya keberhasilan relatif dalam bidang ekonomi yang sudah lama kita kenal sebagai sasaran ujian dari berbagai badan internasional. Tetapi, lebih dari itu, kita pun harus membuktikan bahwa di bidang cara kita memperlakukan sesama warga kita, kita juga pantas diteladani atau menjadi teladan dari serangkaian negara-negara yang berbeda ragam — baik sistem politik, jumlah penduduk, maupun lingkup budaya masing-masing — di empat benua (Amerika Latin, Afrika, Eropa bagian Selatan, dan Asia).

Kalau kita tinjau sejarah KTT-KTT GNB, maka setiap negara penyelenggara KTT, pada akhirnya, di samping mempertaruhkan martabatnya, juga mempertaruhkan prestasi pembangunan politik, pembangunan ekonomi, dan pembangunan budayanya. Bukan saja terhadap dunia luar secara khusus, tetapi juga sebagai bagian dari persaingan antar negara-negara sedang berkembang. Ini untuk membuktikan bahwa model pembangunannya itu adalah yang paling demokratis, paling memperhatikan hak asasi, dan — sejak lima tahun lalu — paling memperhatikan masalah lingkungan hidup.

Jadi, saya kira, di kedudukan kita sebagai

Ketua GNB kita akan menghadapi "tri-tunggal" — demokratisasi, hak asasi, dan lingkungan hidup — yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dan ini adalah bagian dari taruhan kita sebagai bangsa dan sebagai budaya, untuk membuktikan bahwa kita pantas memimpin gerakan dari negara-negara yang situasi sosial-ekonomi, situasi sosial-politik, dan situasi sosial-budayanya seringkali sangat memprihatinkan atau, bahkan, menyedihkan sekali.

Kemudian yang ketiga, seperti yang tadi disebut oleh Saudari Dewi Fortuna Anwar, adalah bahwa tri-tunggal tersebut menjadi bagian dari percaturan politik internasional, percaturan politik-ekonomi internasional, yang kasarnya seringkali dipakai sebagai dasar atau alasan untuk mengajukan persyaratan atau menunda, bahkan membatalkan sama sekali, bantuan luar negeri kepada negara-negara sedang berkembang.

Saya kira kita maklum bahwa, terlepas dari latar belakang penggunaan kondisionalitas tadi sebagai persyaratan, kita sendiri sering menyadari bahwa ketiga hal itu adalah salah satu bentuk dari proteksionisme terselubung yang dipakai di dalam berbagai medan persidangan parlemen atau kongres Amerika atau dewan-dewan perwakilan, yang seringkali menghadapi lobi-lobi kuat dari berbagai industri dan usaha pertanian: yakni mencegah masuknya barang-barang ekspor dari negara-negara berkembang, dengan dalih bahwa negara atau bangsa yang bersangkutan tidak menghormati prinsip-prinsip pemerintahan demokratis, atau hak asasi, atau lingkungan hidup, atau ketiga-tiganya.

Saya kira, kalau dilihat dari situ, kita menghadapi beban yang berat dalam tiga tahun mendatang, yang sebetulnya bukan seharusnya kita terpicat hanya pada tiga tahun ke depan, meskipun tiga tahun ke depan adalah mandat resmi. Karena itu Presiden mengangkat empat Duta Besar Keliling (untuk Amerika Latin, Afrika, Eropa dan Asia) khusus untuk menangani kedudukan Indonesia sebagai Ketua GNB.

Dalam hal ini, yang ingin saya himbau pada kawan-kawan di sini adalah, *pertama*, kita harus

tetap tenang menghadapi apa yang disebut sebagai suara-suara sumbang dari luar negeri mengenai keadaan demokrasi, hak asasi, dan lingkungan hidup di negara kita. Karena kini bukan waktunya lagi bagi kita untuk mempersoalkan apakah itu soal campur tangan dalam masalah dalam negeri atau masalah kepedulian tentang kemanusiaan.

Kedua-keduanya memang sama-sama berhak untuk diajukan. Tetapi kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa, kalau kita berani mengumpat tentang apartheid di Afrika Selatan, maka kita pun harus berani menghadapi kritikan tentang keadaan dalam negeri kita. Benar atau salah, kritik internasional sudah melintas apa yang disebut sebagai kedaulatan negara. Atau, dengan perkataan lain, kedaulatan itu sudah relatif sekali artinya dalam dunia yang padat dengan komunikasi dan lalu lintas antar masyarakat seperti sekarang ini.

Maka yang kita ajukan, tentunya, adalah suatu upaya dan tekad ke dalam. Dan adalah tugas kita sebagai kelompok yang mempunyai kepedulian bahwa, pada akhirnya, prestasi dan energi kita sebagai bangsa, di dalam, adalah pertanggungjawaban kita sendiri. Jadi, komitmen kita terhadap apa yang disebut sebagai *the international bill of right*, yang mencakup hak-hak sosial-ekonomi, sosial-politik dan budaya berikut protok-protokol yang mendampinginya, kita terima saja sebagai prinsip-prinsip yang universal; dan kita akui bahwa dalam implementasinya tidak mungkin ada standar yang universal. Tidak mungkin. Karena kita tahu bahwa dalam pelbagai perdebatan yang ada, sering dikatakan bahwa negara-negara Barat cenderung menekankan hak-hak sipil dan politik. Dan itu dianggap kurang adil, karena kondisi-kondisi sosial-ekonomi di banyak negara berkembang tidak memungkinkan persyaratan minimal untuk menjalankan hak situasi politik seperti itu berlaku.

Jadi, lepas dari perdebatan interdependensi itu, bahwa hak sosial-ekonomi-budaya dan hak sosial-politik itu adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dan karena itu ada prinsip apa yang

disebut interdependensi, maka dalam implementasinya kita harus terima untuk sementara. Bahwa dalam pemberitaan pers dunia dan dalam gugatan pemerintah-pemerintah negara Barat, tekanan pada hak-hak veto dan politik adalah sesuatu yang harus kita terima sebagai hal yang ada.

Saya tidak setuju pada kawan-kawan dari Malaysia dan Singapura yang cenderung menghantam kembali dan mengambil jalan dua kesalahan menjadi satu membenaran. Artinya, kekurangan-kekurangan di dalam bidang sipil dan politik yang ada di kita, kita lampiaskan dengan mengatakan "dulu negara-negara Barat adalah kolonialis dan dus — karena itu — negara-negara Barat sekarang tidak berhak untuk menggurui kita."

Saya kira bukan begitu cara menghadapi gugatan-gugatan internasional. Kalau itu yang dilakukan, kalau pun sejarah diwarnai penindasan semacam itu, kita tidak keluar dari tekad kita sendiri, kalau prinsip-prinsip itu kita terima sebagai hal yang universal, walaupun dalam implementasinya bisa kita jelaskan. Tidak mungkin dalam masyarakat di mana kondisi sosial-ekonominya jauh berada di bawah garis kemiskinan absolut, apalagi garis kemiskinan nisbi, orang mempersoalkan kemerdekaan sipil dan politik. Jadi, bukan cara itu yang harus kita lakukan. Kita harus menghadapinya dengan sikap tenang, kepala dingin, dan menerima baik kritik-kritik tersebut sebagai satu tanda kepedulian internasional tentang keadaan di negara kita.

Prinsip *kedua* adalah mengenai keunikan situasional. Kita sering mengatakan bahwa masing-masing negara mempunyai sejarah yang berbeda, masalah kependudukan yang berbeda, tradisi-tradisi politik yang berbeda (Jawa, Sulawesi, Sumatera) yang tak mungkin dipadukan. Jadi, penjelasan tentang apa yang disebut *situational uniqueness* ini sering juga dipakai oleh tokoh-tokoh di negara-negara yang sedang berkembang sebagai apologia, sikap defensif: bahwa gugatan dari negara-negara kaya itu tidak adil dan tidak pada tempatnya. Dan karena itu kembali lagi kita cenderung melampiasikan dua

kesalahan sama dengan kebenaran.

Kita cenderung menyalahkan orang Amerika membantai orang-orang di India; orang di Australia membantai orang aborigin; orang-orang di Eropa membantai orang Gypsy. Saya kira, bukan itu jalannya, walaupun di dalam forum-forum politik internasional boleh saja itu sekali-sekali diajukan guna mengempeskan pendapat orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Tetapi jika cara itu dipakai terus-menerus, saya khawatir hal itu juga akan menunjukkan kita tidak konsisten dengan tekad kita sendiri, yakni bahwa semua persoalan pelanggaran hak asasi adalah masalah kemanusiaan, sesuai dengan yang ada dalam UUD kita.

Yang *ketiga* adalah masalah prinsip kondisionalitas. Kita sama-sama tahu bahwa seringkali bantuan luar negeri adalah sesuatu yang justru lebih menguntungkan negara-negara donor dari pada negara-negara penerima. Tetapi sejauh bantuan tersebut adalah kesempatan untuk mendapat kredit yang relatif lunak di dalam situasi internasional yang agak sulit, maka istilah bantuan luar negeri bisa juga diterima sebagai peluang untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan. Karena itu, saya juga tidak terlalu setuju kalau masalah kondisionalitas itu terlalu digugat sebagai sikap menggurui atau sikap dari negara donor atau calon donor untuk memberi persyaratan menunda atau membatalkan bantuan tersebut. Kita serahkan saja kepada permainan sistem politik masing-masing, bahwa ini adalah hal yang secara prosedural harus dijalani di masing-masing parlemen atau konperensi.

Prinsip yang *keempat* adalah bahwa kita sebagai Ketua GNB kebetulan, setahun sebelum KTT diselenggarakan di Jakarta, mengalami masalah Timor Timur yang berujung pada sanksi ekonomi. Saya masih ingat betul, setahun yang lalu Deplu (Departemen Luar Negeri) sedang mempersiapkan konperensi regional PBB Asia-Pasifik tentang hak-hak asasi, dengan harapan bahwa kita dapat menyepakati, di kawasan Asia-Pasifik ini, satu standar yang relatif baku mengenai pematuhan dan pelaksanaan hak-hak asasi —

seperti yang dicapai di Amerika Latin dan Amerika Tengah, Afrika dan Eropa. Tadinya, kita mau menjadi tuan rumah konperensi ini di Jakarta. Tetapi karena peristiwa Dili 12 November 1991, PBB terpaksa membatalkan niat kita. Jadi kita terkena salah satu prinsip hak asasi internasional sekarang ini, yaitu prinsip kondisionalitas dan sanksi.

Masalah ini pun sebetulnya sudah berkali-kali kita jelaskan ke berbagai pihak di luar bahwa, seringkali yang terkena dan terpukul oleh sanksi adalah rakyat biasa, terutama dalam hal proyek-proyek yang padat karya dan dalam hal penundaan proyek-proyek infrastruktur untuk jalan, jembatan dan sebagainya. Jadi, sekali lagi, ini adalah beban yang harus kita pikul sebagai bagian dari permainan internasional yang melibatkan bantuan luar negeri, kebijakan politik luar negeri, dan masalah sanksi lingkungan dengan pelanggaran-pelanggaran.

Kemudian yang terakhir, *kelima*, adalah masalah kaitan domestik dan internasional. Saya kira, salah satu hal yang kita hadapi sebagai Ketua GNB adalah, misalnya, persoalan diskriminasi memilih masalah. Setelah peristiwa Dili, ada beberapa kalangan yang mengajukan keberatan, mengapa hanya di peristiwa Dili saja ada komisi penyelidikan nasional; apakah itu sebagai reaksi terhadap kemungkinan jatuhnya sanksi dan penundaan atau pembatalan bantuan luar negeri?

Saya kira, kita juga tidak bisa lepas dari kenyataan banyaknya peristiwa yang terjadi di negara-negara Non-Blok, musibah karena peristiwa-peristiwa alam atau perbuatan-perbuatan manusia. Itu dibagi-bagi: antara musibah yang disengaja atau pun yang tidak disengaja. Pada waktu peristiwa Dili, saya masih ingat almarhum Anang Adenansi itu mengatakan: "Apa istemewanya Dili bila dibandingkan dengan Aceh atau Irian Jaya?"

Adalah tentu bahwa kalau dilihat dari politik internasional, perbedaan pokok antara ketiganya — atau dengan Kedung Ombo atau dengan yang lainnya — adalah bahwa profil dan mata rantainya panjang. Dili adalah bekas jajahan Por-

tugal. Ini berarti kita mempunyai mata rantai ke Australia, Eropa, komisi hak asasi di Jenewa, markas besar PBB dan forum IGGI. Tetapi kita juga harus ke dalam, harus sepakat bahwa perbedaan-perbedaan ini adalah hal yang tak terelakkan di dalam mengkaji kaitan domestik dengan masalah internasional. Mungkin bagi masyarakat muslim, peristiwa atau musibah di Aceh bahkan bisa dikatakan lebih mencekam. Karena 2000 orang lebih mati di sana. Tapi concern internasional tidak sebesar seperti jumlah 150 orang di Dili. Hal-hal seperti ini, yang mata rantainya terkait ke seluruh peloksok dunia lain, termasuk negara-negara sedang berkembang, membawa beban dan tugas tersendiri pada kita untuk menjelaskan kaitan masalah domestik dengan masalah internasional.

Sampai di sini, saya kira cukup sekian pengantar dari saya. Saya tidak ingin membandingkan pelaksanaan HAM di antara negara-negara Non-Blok atau sistem politik mana yang paling tidak menghargai hak asasi. Tapi saya ingin menghimbau pada semuanya bahwa, komitmen kita dalam menjalankan peran Indonesia sebagai Ketua GNB bukan, terutama atau semata-mata, tugas pemerintah. Marilah kita pikul dan kita hadapi tugas ini bersama-sama dengan kepala dingin, disertai dengan penuh kepercayaan bahwa tanggung jawab pelaksanaan dan peningkatan demokrasi, peningkatan hak asasi, dan pelestarian lingkungan hidup, adalah tanggung jawab kita semua.

#### Habib Chirzin

Saya tertarik pada beberapa hal. Tapi saya membatasi pada dua hal saja. Pertama mengenai kedaulatan. Sebenarnya, sejauh mana masalah kedaulatan ini dijadikan dalih untuk, katakanlah, tidak memperoleh campur tangan atau pun kondisionalitas ini. Karena dalam situasi masyarakat sekarang ini, kedaulatan perlu ditinjau kembali pengertiannya. Juga prakteknya dalam hubungannya dengan masalah lingkungan. Hemat saya, pengertian kedaulatan menjadi begitu relatif. Dalam masalah hak asasi, bagaimana hubungan-

nya dengan kedaulatan?

Yang kedua mengenai standar pelaksanaan dan keunikan. Ini juga dijadikan dalih terutama oleh negara-negara berkembang. Sementara negara-negara Barat, ketika diambil suara mereka di sidang PBB tahun 1986, tidak menyetujuinya (misalnya Amerika, Jepang dan beberapa negara Skandinavia. Bahkan sampai sekarang pun Amerika dan Jepang tidak meratifikasi. Bagaimana komentar Pak Juwono?

**Bismar Siregar**

Khusus mengenai ajakan kita sebagai bangsa. Saya kira, kalau kita konsekuen dengan Pancasila, tidak akan muncul di sini sifat-sifat emosional. Kita selalu dilandasi oleh ketenangan. Mengapa? Sebagai seorang muslim, bila mana kita ditimpa musibah, kita selalu tawakkal dan sabar. Tentu kita juga mencari apa sebabnya. Karena itu, bila Pak Juwono tadi mengemukakan, "Janganlah kita seperti Malaysia dan Singapura, selalu mengembalikan tentang kesalahan dan akibat ...."

Saya sangat menghargai mereka. Mereka mampu berkata demikian. Karena mereka termasuk golongan yang kaya. Saya terperanjat waktu membaca, pada waktu KTT, uraian mengenai pendapatan perkapita kita. Tadinya saya sudah melihat mungkin sudah 600 atau mungkin 700. Ternyata 480! Apakah ini masih pengakuan, masih mempunyai hak asasi manusia?

Mengapa terjadi yang demikian? Karena kita sudah berhutang. Sepanjang keyakinan saya, bila orang atau bangsa itu berhutang, ia suka bohong. Karena, tangannya di bawah mengharap belas kasih. Karena itu timbul pertanyaan saya selama ini, apakah masih bermanfaat hutang yang demikian?

Saya sungguh berterimakasih bila harga diri kita akan kita kembalikan ke satu-satunya jalan: mampu untuk menghindarkan hutang, walaupun diperlukan. Tak ada negara dan bangsa yang dirahmati Tuhan, melebihi bangsa Indonesia. Semuanya ada.

**Juwono Sudarsono**

Saya kira pertanyaan yang harusanggapi adalah dari Pak Habib Chirzin. Kalau kita perhatikan piagam PBB, sebetulnya sudah tercakup di situ perdebatan abadi mengenai kedaulatan. Negara atau anggota negara, diakui pada pasal-pasal awal. Tapi pada bab VI dan VII, ada pasal-pasal yang membenarkan campur tangan atau yang disebut masyarakat internasional tentang berbagai hal yang terjadi terutama yang dianggap bisa mengganggu keamanan dan ketertiban.

Baiklah kita terima bahwa PBB adalah ciptaan lima besar, yakni anggota tetap Dewan Keamanan. Karena itu pasal-pasal dalam piagam PBB tersebut harus sejalan dengan kemauan kelima negara itu. Tapi kita tahu juga, bahwa akibat perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan lalu lintas barang dan jasa, tidak kurang juga lalu lintas orang yang bepergian ke mana-mana, kedaulatan yang dulu atau yang sekarang kita pertahankan sebagai kedaulatan hukum atau kedaulatan negara itu makin lama makin tidak nyata. Sekarang ini, kita harus mengakui pasal-pasal mengenai kepedulian internasional itu, yang seringkali melangkahi konsep kedaulatan negara.

Dalam hubungan itu, dan dalam hubungannya dengan komentar Pak Bismar Siregar yang pertama, saya tidak setuju dengan ucapan Pak L.B. Moerdani bahwa negara-negara Barat itu kurang sopan karena tidak tahu diri dalam campur tangan dalam urusan-urusan dalam negeri. Saya kira, kalau kita berani menggugat Israel di tepi Barat sungai Yordan, berani menggugat orang-orang keturunan Belanda di Republik Afrika Selatan dalam gerakan Apartheid, berani menggugat masyarakat yang kita tidak tahu keadaan yang sebenarnya di Republik itu, maka kita juga harus terima bahwa dalam dunia yang serba menyatu ini, tidak ada lagi kedaulatan mutlak. Kita serahkan saja pada ahli-ahli hukum, termasuk ahli hukum tata negara: di mana campur tangan dan di mana keputusan masalah itu bisa dimenangkan.

Mengenai standar pelaksanaannya, ini agak sulit. Sebab, umumnya yang digugat dalam

masyarakat internasional, dan dalam hal ini umumnya pers Barat, adalah suatu kejadian dramatis yang bisa disorot dan yang mempunyai dampak terhadap nasib atau kedudukan seorang tokoh politik di dalam sistem politiknya. Saya ingin memberi contoh. Anggota Kongres AS, Claiborn Pell, dari negara bagian Rhode Island, berhasil menggalang pendapat agar bantuan 2,1 juta dolar untuk pendidikan perwira-perwira kita di berbagai sekolah di AS dibatalkan. Alasannya sederhana, yakni karena negara bagian tersebut kebetulan banyak penduduknya yang keturunan Portugal.

Saya kira kita bisa terima hal itu sebagai sesuatu yang, katakanlah, wajar. Karena untuk bulan Oktober 1992 ini, perimbangan kekuatan dalam Kongres AS kebetulan menguntungkan. Ini masalah yang relatif kecil di mata AS, tetapi yang sekaligus berhasil diperjuangkan menjadi satu masalah yang cukup memukul pemerintah, pimpinan Departemen Hankam kita. Tapi saya kira reaksi dari kita terlihat juga. Tidak lama setelah peristiwa itu, Pak Try pergi ke RRC dan berdialog dengan pimpinan tentara pembebasan rakyat RRC. Ini adalah satu hal yang untuk kita pun, rakyat Indonesia, tidak terbayangkan di masa yang lalu.

Jadi kadang-kadang perimbangan kekuatan politik di luar negeri memungkinkan satu standar tertentu naik ke peringkat pertama dan hal-hal lain tidak. Contoh lain adalah *concern* mengenai Khmer Merah sekarang. Mereka selama satu tahun ini menunggu-nunggu saat untuk menggugat Persetujuan Paris, karena mereka anggap persetujuan itu hanya menguntungkan pemerintah Hun Sen dan UNTAC (*United Nations Temporary Administration for Cambodia*). Itu bisa mereka lakukan, karena selama satu tahun ini perhatian dunia berpusat pada masalah Bosnia. Jadi satu perhatian khusus bisa menenggelamkan masalah lain.

Saya, juga Pak Princen, kurang lebih sebulan yang lalu, diskusi di LBH. Panitia Nobel baru mengumumkan hadiah Nobel bidang perdamaian kepada Rigoberta Menchu (aktivis HAM dari

Guatemala, atas perjuangannya membela penduduk asli Indian — Red.). Serta merta orang mengatakan, "Itu 1500 tahun terlambat diberikan, dan karenanya, itu sudah merupakan bukan penghargaan, melainkan bahkan penghinaan." Jadi, antar kawasan pun, masalah seringkali timbul: standar apa yang kita pakai.

Belum lagi yang saya sebutkan juga dalam diskusi waktu itu, bahwa ada pelaksanaan yang berbeda. Ada perlakuan yang berbeda: Hak asasi yang diberikan kepada tokoh, dengan hak asasi yang diberikan kepada non-tokoh. Kalau sewaktu mendengar bahwa Pak Princen ditahan, langsung kawan-kawan di luar negeri menyorot beliau. Dan saya kira Pak Princen adalah orang pertama yang mengaku bahwa beliau mendapat keuntungan dari sorotan internasional, sehingga ada *bergaining power* politis, supaya masalah beliau bisa ditangani. Tapi yang sering kita lupa adalah sejumlah besar orang non-tokoh yang bukan semacam Princen, Sakharov, dan lain-lain, yang nasibnya kita tidak tahu, tetapi yang sama-sama menderita dari hak asasi. Jadi ada derajat-derajat perlakuan intern yang juga kita tidak bisa lakukan secara adil. Sebab pada akhirnya, menurut saya, hak asasi juga adalah masalah yang selalu harus berlaku.

#### H.J. Princen

Saya sependapat bahwa memang kedaulatan itu relatif. Jadi bagi saya, justru karena kedaulatan itu relatif, saya sedikit heran mengenai KTT GNB. Kita terlalu berambisi mau menjadi kepala KTT, padahal situasi di dalam negeri pun belum beres. Kita mau bicara mengenai demokrasi. Kita mau bicara mengenai kebebasan pers. Jadi bagaimana negara kita ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi negara-negara lain. Saya kira saya juga tidak begitu paham. Tapi di dalam Al-Qur'an juga pasti ada kalimat yang mengatakan bahwa jangan kamu membayangkan bisa memberi pelajaran kepada orang lain, kalau kamu sendiri belum mampu. Jadi problem yang dihadapi secara umum bagi saya adalah bagaimana melihatnya dari dalam dan apa yang bisa kita

perbuat untuk memperbaiki situasi di dalam negeri ini. Dan juga, bukan hanya dengan membikin ribut atau memprovokasi insiden-insiden dan lain-lain. Itu yang ingin saya komentari.

Selain itu, ada satu hal yang sulit bagi saya. Saya memang termasuk kaum yang menyeberang dulu, karena saya seperti ... dengan Indonesia, yang membuat saya seorang nasionalis. Jadi saya juga tampil terlalu berani kalau ada bule-bule lain yang mau turut mengatur situasi di sini. Kita harus lepaskan ide-ide itu. Karena persoalan hak asasi adalah persoalan global. Persoalan dunia secara umum.

#### M. Syaffi Anwar

Terpilihnya Clinton-Al Gore ditanggapi secara berbeda di Indonesia. Ada yang beranggapan bahwa dengan terpilihnya kedua tokoh tersebut, tri-tunggal yang Pak Juwono singgung itu akan semakin intensif. Artinya, hal itu sudah merupakan obsesi dari, katakanlah, Clinton-Gore dan juga Partai Demokrat, yang untuk pemilihan Presiden AS tahun ini masih juga memegang otoritas di Senat. Tapi ada juga yang berpendapat, tidak ada bedanya antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Karena pengalaman yang sudah-sudah seperti itu. Baik perhatiannya terhadap Dunia Ketiga, maupun negara-negara miskin dan sebagainya.

Persoalannya adalah, seperti kata William Liddle, Clinton-Gore tidak tahu tentang Indonesia. Artinya, menurut saya, mungkin bisa jadi Indonesia tidak menjadi bagian dari perhatian Amerika. Pertanyaan saya adalah, dengan penghentian bantuan untuk pendidikan para perwira militer di Amerika itu saja pemerintah kita berhitung — walaupun dengan semangat dikatakan bahwa itu tidak akan ada pengaruhnya. Tapi saya juga bertanya, apa memang demikian?

Yang kedua, dampak dari globalisasi adalah berkembangnya proses yang disebut sebagai proses demiliterisasi. Kalau globalisasi-demiliterisasi meluas, represi — seperti kata Herbert Feith — sulit dibenarkan. Persoalannya adalah, apakah kita punya respons atauantisipasi untuk

mengatasi kenyataan seperti itu. Sebab, dengan globalisasi itu, nyata bahwa demiliterisasi sudah merupakan, katakanlah, sesuatu yang sifatnya imperatif.

#### Syahganda

Sudah sekian lama saya mengikuti diskusi-diskusi tentang HAM. Saya semakin yakin, bahwa masalah HAM ini seperti kotak hitam di ruangan gelap yang tengah dicari oleh orang yang buta. Jadi adalah repot membicarakan masalah HAM ini. Saya pikir HAM itu harus diterjemahkan lebih detail lagi. HAM mungkin juga mengharuskan kita bicara tentang hak ekonomi, hak politik, dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan itu semua, apa yang diuraikan Pak Juwono tadi, tentang empat prinsip itu, menurut saya, sebenarnya mungkin kita harus sepakat bahwa memang kita tidak minta untuk digurui oleh negara-negara Eropa. Sebab kita bisa buktikan secara ekonomi bahwa sebenarnya tidak ada kaitan antara hutang luar negeri dengan HAM. Kita sudah membuktikan bahwa ketika kita menolak Belanda, justru Belanda yang menyesal. Mengapa? Karena sebenarnya, dengan memberi hutang, mereka itu untung. Jadi saya sebenarnya tidak sepakat, misalnya, bahwa ada persoalan apakah kita terima kritik-kritik soal pelaksanaan HAM di kita, dan sebagainya. Di satu sisi, kalau kita buat GNB, kita harus tunjukkan pada dunia bahwa ada kelompok rakyat yang miskin. Mengapa? Karena sebagian besar orang-orang menghisap di Utara. Sehingga mereka tidak usah menggurui. Ini penting kita pegang.

Tapi, apa yang dikatakan Pak Princen, bahwa kita sendiri harus outkritik, itu mungkin kita bisa sepakat. Bahwa secara ekonomi kita bisa buktikan bahwa memang terjadi juga di sini kesenjangan. Kita juga bisa buktikan secara politik bahwa ada sebagian besar hak-hak politik yang tidak diberikan. Jadi mungkin apa yang bisa dilakukan Indonesia sebagai ketua GNB pertamanya adalah, dia harus mencoba sedikit lebih bagus dalam upaya membuktikan diri — sebagai negara berkembang — untuk bisa hidup mandiri,



baik secara ekonomi, politik, sosial, dan seterusnya. Misalkan saja, kalau Presiden minta supaya ada perubahan dalam Dewan Keamanan PBB. Lainnya, bagaimana Indonesia membangun institutional bulding GNB. Ini bisa menjadi suatu kekuatan alternatif. Misalkan GNB masuk pada Dewan Keamanan. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus memberikan saran-saran, bahkan kecaman terhadap Indonesia, agar juga memperbaiki kondisi dalam negeri, secara ekonomi dan politik.

Saya pikir itu pendapat saya yang sekaligus kritik terhadap empat prinsip yang Pak Juwono berikan tadi. Walaupun dalam beberapa hal saya sepakat, tapi dalam hal-hal lain, saya tidak sependapat dengan Pak Juwono. Misalnya dalam soal kritik dari luar. Saya pikir itu juga tidak benar. Kita harus tidak mau dikritik oleh Eropa atau Belanda atau yang lain. Karena memang mereka tak punya hak untuk mengkritik itu. Karena pertama, dia sendiri menjajah kita dengan uang pinjamannya. Jadi saya pikir tidak ada hak asasi di sana. Mungkin yang ada adalah pelanggaran hak asasi di Eropa, karena memang penindasan paling terasa di sana. Jadi saya bertentangan. Saya pikir, saya tidak mau dikritik. Indonesia tidak menerima kritik-kritik untuk persoalan hak asasi. Tapi orang-orang Indonesia atau tokoh-tokoh hak asasi seperti Pak Princen dan kawan-kawan itulah yang harus melakukan gerakan-gerakan di dalam. Bila perlu melakukan reformasi struktural di Indonesia ini. Kita urus diri kita sendiri.

#### Ismail Sunny

Kemarin saya diminta oleh UNISBA, Bandung, untuk menyampaikan orasi ilmiah tentang sejarah dan masa depan HAM di Indonesia. Saya akan bacakan sedikit makalah saya itu di sini: "Sesuai dengan perintah Ketua Dewan Hankamnas RI merangkap Presiden RI, telah disiapkan rancangan program tentang HAM dan hak-hak serta kewajiban warga negara RI. Dengan keinginan politik ini, dapat kiranya melahirkan piagam HAM dalam bentuk ketetapan MPR

dalam waktu yang tidak begitu lama."

Soalnya begini. Sewaktu Sekjen Hankamnas menyerahkan GBHN kepada Presiden kira-kira bulan Juni yang lalu, Presiden minta supaya dibuat rancangan ketetapan (rantap) mengenai demokrasi Pancasila dan HAM. Rantap tentang demokrasi Pancasila sudah diserahkan kepada Presiden sebelum sidang MPR. Dua minggu yang lalu, di Dewan Hankamnas sudah dibuat rantap tentang HAM. Tapi saya belum bisa merubah namanya menjadi piagam HAM. Jadi sekarang ini sudah ada bahan-bahannya. Tapi saya lihat program Hankamnas itu baru bulan Februari akan disidangkan di Bali. Kalau rantap tentang HAM itu mau dibawa ke Sidang Umum MPR yang akan datang, maka sebenarnya perslah yang harus meminta barang itu supaya dibawa ke sidang MPR. Sebab sebenarnya begitu maksud Presiden.

Sebagai anggota MPR Golkar, saya sendiri tahu bahwa tidak merupakan program Golkar untuk membawa demokrasi Pancasila ke sidang MPR sekarang. Dan yang meminta hanya Fraksi PDI. Sampai kini, belum ada satu fraksi pun yang minta supaya ada rantap tentang HAM. Tapi Presiden sudah menyiapkannya. Jadi kalau ada permintaan masyarakat, sebenarnya itu bisa dipercepat dan tidak mustahil dibuat. Jadi saya cuma ingin menyatakan bahwa kemauan politik nampaknya sudah ada.

#### H.J. Princen

Menurut pendapat saya, pemerintah berada dalam paket yang sangat rumit. Dan ini juga kejadian-kejadian politik. Kalau tidak terjadi peristiwa Timtim, mungkin pemerintah juga tidak mengerti mengenai keharusan tentang HAM itu. Jadi jangan lupa bahwa ini adalah akibat dari, seperti Pak Juwono katakan tadi, ekor panjang situasi politik dunia dengan situasi politik intern.

Dua minggu lalu saya berbicara dengan seorang intel. Dia bertanya, "Apa yang saudara kehendaki?" Saya bilang: "Pertama, kita tidak benci tentara. Tapi kita tidak setuju dengan instruksi. Apa yang kita kehendaki adalah duduk satu meja, seajar. Dan kamu bersumpah setia

bahwa hak-hak asasi manusia tidak akan dilanggar." Itu yang kita kehendaki. Saya kira, semua orang juga mau demikian. Apakah dalam bentuk UU atau bentuk deklarasi atau yang lain. Kita pun sebagai warga negara tidak akan melanggar hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apakah itu memerlukan perubahan UUD? Oke! Mengapa tidak? Toh UUD bisa dirubah. Jadi jelasnya, kita ingin itu. Tapi iklim kita tidak memungkinkan. Tapi toh harus dicoba.

#### Juwono Sudarsono

Kalau dilihat secara struktural, di kebanyakan negara-negara Non-Blok, pelanggaran-pelanggaran hak asasi dalam bidang sosial-ekonomi sudah terjadi setiap hari. Tapi dalam permainan internasional, kecenderungan untuk menyorot hak-hak sipil dan politik adalah hal yang tak terlakkan. Karena mereka menguasai seluruh kekuatan intelektual, sosial, budaya, termasuk media massa. Dan karena itu, suka atau tidak, kita adalah bagian dari permainan itu. Tinggal bagaimana cara dan sikap kita. Kalau kita menghantam kembali, dan mengacu pada kolonialisme, itu tak akan habis-habisnya nanti. Kita harus terima dengan kepala dingin. Yang penting, lepas ada atau tidaknya tekanan-tekanan dari luar, kita ditantang untuk berbuat atas nama rekan-rekan lain yang belum mempunyai kesadaran hak asasi atau perhatian terhadap hak asasi.

Kalau memang masalah struktural, baik karena kesalahan-kesalahan dalam negeri maupun karena pertimbangan Utara-Selatan maupun karena sejarah, itu mau kita tampung semuanya, saya kira kita hanya sampai pada kesimpulan: memang implementasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar itu — termasuk hak-hak sipil dan politik, terutama hak-hak sosial, ekonomi, budaya — adalah satu perjuangan jangka panjang. Apalagi jika dikaitkan dengan masalah pelestarian lingkungan. Kita mesti terima. Tapi kalau kita melampiasikan itu sebagai hal bahwa negara-negara Barat itu tidak perlu menggurui kita, saya kira tidak benar juga. Saya kira kita cukup besar sebagai bangsa dan budaya untuk

menghadapi itu.

Ada satu hal yang ingin saya kemukakan tentang kurangnya mawas diri di dalam GNB, karena ada kesepakatan di dalam GNB untuk tidak mengomentari keadaan dalam negeri masing-masing. Karena kita tuan rumah KTT, tidak satu pun dari anggota yang mengangkat masalah Timtim. Tapi juga kita tidak mengangkat masalah-masalah hak-hak minoritas di Malaysia, pembantaian etnis di Afrika atau di bekas Yugoslavia. Malah hampir saja terjadi clash menjelang KTT, mengenai apakah Bosnia itu masalah etnis atau agama atau kedua-duanya. Akhimya dibawa ke persidangan PBB dan pada bulan September ternyata konsep yang dibawa Malaysia lebih unggul dari pada yang kita pertahankan. Itu konsekuensi dari adanya diskriminasi pemilihan masalah. Pada akhimya saya kira kita harus bermain dalam dua peringkat, barangkali. Peringkat pertama, keberhasilan kita menjalankan diplomasi tri-tunggal ini, sejauh kita bisa memainkannya dengan melihat keuntungan-keuntungan dan peluang-peluang yang ada dalam waktu tiga tahun.

Tapi yang lebih penting lagi adalah kita sejalan. Kita sendiri, bukan saja pemerintah. Sebagai warga negara, terutama kita-kita yang sudah menikmati hak-hak sosial-ekonomi, kita berusaha untuk mengadakan pertemuan-pertemuan semacam ini dan menekankan bahwa masalah-masalah ini penting untuk ditanggung bersama.

#### Dewi Fortuna Anwar

Kalau kita perhatikan sikap antara Barat dan Timur, dalam masalah hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup, kita menemukan ada dua masalah: *massage* dan *massanger*. Sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah *massage*, tapi yang terakhir. Ada orang yang menganggap dirinya menjadi *a top of project massanger*, dan itu ingin diterapkannya pada pihak lain.

Kalau memang kita lihat cara-cara negara-negara besar memakai isu ini selama Perang Dingin, AS justru memberikan bantuan yang besar-besaran kepada negara-negara yang rekor HAM-

nya sangat minim. Dan malahan, kalau ada pemerintahan yang kiri, itu sengaja digulingkan karena dianggap terlalu cenderung kepada komunis. Kita dapat menemukan kasus ini di Amerika Latin, banyak sekali. Setelah komunisme hancur, tidak ada lagi alasan untukengebawahkan masalah HAM. Ia muncul ke atas. Jadi dari sisi ini memang kita bisa menuduh pihak Barat sebagai oportunis.

Tapi di sisi lain, kita tidak bisa menganggap bahwa semua orang Amerika itu oportunis. Karena di dalam programnya sendiri, mereka itu concern terhadap masalah-masalah ini. Jadi sebenarnya ada dikotomi antara politik pemerintah dengan pandangan-pandangan rakyat. Sekarang ini, pemerintah tampaknya lebih peka terhadap tekanan pada rakyat. Bush, misalnya, bisa dikalahkan. Padahal dia itu tokoh yang dianggap memenangkan perang Tapi kini dia sudah dianggap tidak relevan lagi.

Kita masih sering merasa tersinggung kalau orang mengkritik kita. Kalau seandainya kita merasa bahwa seandainya kita sudah cukup mempunyai kepribadian yang tangguh, kritik bisa kita terima. Tapi itu berarti kita juga bisa mengkritik orang lain. Sehingga terjadi dialog yang timbal-balik. Kita juga bisa mengkritik AS dalam masalah rasisme di Los Angeles, misalnya. Kenapa kita tidak bersuara? Saya curiga, kita tidak ingin dikritik bukan karena kita melihat hal itu sesuatu yang salah. Tapi ya itu: kita takut dikritik tadi. Jadi sebenarnya masalahnya bukan apakah orang kritik kita dan kita terima atau tidak, tapi *self confident* kita itu. Jadi inilah yang barangkali perlu kita pikirkan lagi: apakah memang kita perlu defensif akan harga diri tersebut. Jika memang demikian, berarti kita terlalu takut untuk meminjam dari orang lain. Kita selalu merasa bahwa kita itu paling benar; bahwa kebudayaan kita itu paling tinggi; bahwa ada kebudayaan murni yang kedap terhadap pengaruh luar. Bagaimana ini?

Bismar Stregar

Khusus mengenai MPR, Presiden dan lain-

lain, berprasangka yang baiklah terhadap sesuatu. Sebab kalau sudah dilandasi oleh suatu prasangka yang tidak baik, selalu tertutup hati kita untuk menerima apa yang orang lain katakan. Saya kemukakan bila ada di antara kita, barangkali sayalah orang yang paling committed terhadap hak asasi. Di Lemhanas, beberapa waktu yang lalu, saya kemukakan: melalui Lemhanas ini tolong perhatikan tentang hak asasi. Masa G30S/PKI tersangkut, cicitnya pun ikut berdosa. Di dalam Islam tidak ada dosa warisan.

Ita

Dari beberapa pembicaraan yang dilontarkan, saya belum mendapatkan satu gambaran mengenai apa hakikat HAM itu. Jadi, kalau kita berbicara tentang HAM, kita pasti akan berpulang kepada persoalan apa HAM itu? Hakikatnya apa? Karena, pertentangan HAM terpusat pada persoalan, apakah HAM itu sesuatu yang harus dituntut atau HAM itu sudah seharusnya ada? Inilah persoalan yang paling krusial tentang HAM.

Kemudian, persoalan HAM, jika kita lihat dari hakikatnya, kita juga bisa mencari dari sumbernya: bahwa apakah HAM itu sesuatu yang kodrati, yang melekat sejak awal ketika manusia lahir, atau sebelum orang itu berdiri HAM itu sudah ada? Dan bagaimana konteksnya pada level masyarakat? Sebab kalau kita kembali pada hakikat HAM, maka HAM pada level masyarakat dan HAM dalam konteks negara itu berbeda. Jadi, perbedaan konseptual jelas terlihat di sini, yaitu bahwa konsepsi HAM itu sendiri pada level masyarakat dan level negara. Masalahnya adalah: bagaimana konteks HAM yang dibicarakan di sini di dalam keberbedaannya pada level masyarakat dan level negara? Sebab perbedaan kedua konteks itulah yang, menurut saya, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan konseptual tentang HAM.

Syahganda

Saat ini uang mahal. Sebab negara-negara maju sendiri sedang mengalami resesi. Yang ingin saya ingatkan dalam konteks pembicaraan Indo-

nesia sebagai Ketua GNB dikaitkan dengan HAM adalah, saya pikir, harus ada kesepakatan: apakah kita ingin merelakan permainan internasional dengan isu HAM, untuk semudahnya dan secepatnya mengalirkan dana demi kepentingan dalam negeri dan politik internasional dia. Apakah dengan itu kemudian kita rela dan menjadi bangsa yang kemudian mau menghormati hak asasi yang diajarkan pada kita? Ini pengertian sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat Mr. Pronk datang ke sini, itu sebenarnya mengajarkan dan menggurui. Itu sudah keterlaluan. Jadi kalau kita masih sepakat dengan Pronk waktu itu, saya pikir kita sudah tidak punya bangsa lagi. Kita tidak punya Indonesia sebagai jati diri.

#### M. Abdul Hisyam

Saya menanggapi apa yang dikatakan Syahganda. Bagaimana pun juga, kita selalu mengatakan bahwa Barat tidak mempunyai hak untuk mendikte kita bangsa Indonesia, kemudian bangsa-bangsa di bagian Selatan dan Timur. Namun selamanya kita tidak mempunyai kekuatan *bergaining* dengan mereka. Selamanya Barat selalu saja merasa sah untuk mendiktekan kemauannya kepada kita. Salah satu keunggulan Barat adalah keunggulan mereka untuk merekayasa sejarah sehingga, dalam jangka panjang, mereka mempunyai kekuatan dari segi budaya dan politik. Kalau kita percaya dengan apa yang dipaparkan Edward Said ataupun Noam Chomsky, misalnya, kita bisa tahu mengapa dahulu itu Kipling mengatakan: "*East is east, west is west and never between shall meet.*" Mengapa ada pernyataan semacam itu? Di sini Barat itu mempunyai pandangan bahwa Timur berbeda dengan Barat. Dan seperti pernyataan Marx, bahwa Timur tidak bisa tampil sendiri tanpa kita tampilkan, menjadikan Barat merasa sah untuk memaparkan apa sebenarnya diri mereka dan apa yang baik buat mereka. Itu sudah mengakar dalam sejarah dan sangat kuat. Jadi, meskipun kita mengatakan bahwa mereka tidak berhak dan semacamnya untuk mendikte kita, namun kita sudah kehilangan kekuatan untuk tawar-menawar dengan mereka. Mereka

sudah sedemikian kuatnya.

#### Laode Kamaluddin

Singkat saja: Apakah ada hak asasi untuk berkuasa?

#### Juwono Sudarsono

Saya kira yang paling susah adalah pertanyaan itu mengenai hakekat HAM, karena kalau dilihat dari proses jadinya seorang manusia, kalau kita mau konsekuen, maka seorang itu sama di mana pun dia lahir. Di dalam kondisi apa pun, di lingkungan budaya, lingkungan fisik apa pun, dia harus diusahakan oleh lingkungannya untuk bertahan sebagai manusia, terutama bertahan dalam arti bisa makan, minum dan semacamnya. Kemudian yang lain adalah yang berhubungan dengan penghargaan masyarakat sekitarnya. Kalau kita ambil yang paling absolut, itu berarti, walaupun manusia itu lahir dari — katakanlah — musibah perkosaan, maka orang itu sama haknya dengan orang yang lahir biasa. Tapi kita tahu, begitu dia hidup dalam lingkup sosial budaya tertentu, ada perbedaan perlakuan terhadap keduanya. Jika sudah ada perbedaan ini, secara absolut, sudah ada juga perbedaan hak asasi secara hakiki. Ini yang paling fundamental. Belum lagi kalau diangkat ke tingkat masyarakat dan negara. Juga melihat pergaulan dengan bangsa, agama, atau suku lain. Dan itu kembali kepada masalah: Apakah ada perbedaan hakiki antara orang Lampung, Timor, Aceh yang tewas, terlepas dari caranya. Kalau di masing-masing propinsi itu, di dalam masyarakat Indonesia yang mengaku ber-Pancasila, tidak ada sarana-sarana umum atau jasa-jasa umum yang bisa menyelamatkan manusia Indonesia dari ragam budaya dan suku mana pun tidak tertahan, terjadilah pelanggaran hak asasi secara struktural. Tanggung jawab kolektif dari masyarakat itu adalah untuk merubah situasi dengan kemauan politik, dengan tindakan ekonomi, dengan perlakuan budaya, supaya rata-rata kesempatan orang hidup layak sebagai manusia, baik biologis maupun sosio-kultural itu dipelihara dan dijaga oleh lingkungan sosialnya.

Kembali ke tanggapan Syahganda, saya katakan tidak mungkin kita lepas dari kritik, sejauh kita adalah bagian dari permainan internasional. Suka atau tidak suka, itu akan datang terus-menerus. Karena memang ketimpangan politik dalam dunia internasional ini, termasuk dalam perhatian media massa dalam penyorotan masalah, itu akan selalu dipakai. Kalau kita tolak, itu akan berulang-ulang dilakukan. Yang perlu adalah sikap tenang kita. Menjelaskan secara sabar butir demi butir. Kalau perlu kita mengacu kepada kekurangan-kekurangan mereka. Sekali-kali kita kempeskan mereka. Tapi kalau kita lampiaskan, kita mengatakan bahwa mereka tidak berhak mengajari kita, saya pikir tidak ada gunanya. Boleh sebagai katarsis. Boleh untuk memuaskan diri, bahwa kita punya harga diri, bangsa yang besar. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Ini tidak dewasa. Jadi sejauh dalam perjalanan politik internasional, kita terima saja. Kita balas sewaktu-waktu. Tapi tingkat kematangan dan kebesaran kita saya kira bukan dalam bentuk caci-maki kembali.

Jadi kita kembali ke alur pokok dari diskusi kita hari ini, maka ada semacam mandat untuk kita untuk mem-*back up* duta-duta keliling kita supaya, dalam memperjuangkan martabat dan nama kita dalam permainan internasional yang namanya GNB, atau pun Selatan-Selatan atau Utara-Selatan, mereka bisa dengan lebih tenang menjalankan misi diplomatiknya kalau mereka tahu bahwa kawan-kawan di Indonesia sedang mengusahakan hal yang sama, melalui tekad politik, kebijakan ekonomi, penggalangan bersama. Kita tunjukkan, bahwa kita tengah menuju

ke masyarakat yang lebih baik, mungkin bukan masyarakat serba sempurna, tapi kita tunjukkan bahwa dalam negara sebesar dan, secara politis, serapuh ini, kita bisa mengatakan kepada kawan-kawan di Amerika Latin, Asia, Afrika dan Eropa bagian selatan, bahwa mandat tiga tahun itu tidak kita sia-siakan. Bahwa ada indikator-indikator umum yang menunjukkan bahwa keadaan hak asasi, dari segi ekonomi budaya, maupun di bidang sipil dan politik, meningkat. Itu komitmen pertama.

Kedua, saya kira pertarungan kita adalah ke dalam saja: mengusahakan kepada pemerintah yang punya hak kuasa, untuk mengatakan bahwa mandat ini bukan hanya bagi kita-kita yang menjadi pemikir, cendekiawan, sarjana dan semacamnya, tapi juga merupakan suatu tekad moral: berkuasa itu punya beban, tapi juga hak istimewa banyak. Orang-orang yang punya kesempatan mengendalikan kebijakan umum untuk kurun waktu empat tahun, itu tentu mempunyai beban dan moral yang lebih besar lagi untuk membawa-bawa misi internasional ini supaya berhasil. Dan saya pikir, kita umat Islam Indonesia juga berpeluang untuk menunjukkan nilai lebih yang kita miliki.

Jadi marilah, sambil mawas diri dan dengan hati ikhlas, pikiran tenang, kita mengambil hikmah dari ungkapan dari Pak Bismar tadi bahwa umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, mempunyai peranan khusus untuk menunjukkan bahwa hak asasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari tekad kita sebagai bangsa dan sebagai budaya. ■